



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA AKSI NASIONAL *OPEN GOVERNMENT* INDONESIA
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023-2024**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis *Open Government* Indonesia sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi;
5. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
6. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan saling berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional *Open Government* Indonesia di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 – 2024.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Jaksa Agung Muda Pembinaan agar memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini.
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka turut

mendukung pelaksanaan Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia.

3. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk melaporkan pelaksanaan Program *Open Government* Indonesia kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Biro Perencanaan secara berjenjang.

KETIGA : Langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua angka 2 terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Jaksa Agung ini.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL *OPEN GOVERNMENT*
INDONESIA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2023-2024

**MATRIKS TARGET CAPAIAN RENCANA AKSI NASIONAL *OPEN GOVERNMENT* INDONESIA
2023-2024**

Sasaran Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Bidang Terkait	Target Capaian	Data Dukung
Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia	Adanya implementasi peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum	Tindak Pidana Umum	B06: Terlaksananya peluncuran pedoman penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan	B06: Peraturan teknis berupa pedoman penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.
			B12: Adanya penyusunan materi sosialisasi dari peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum di Kejaksaan	B12: Materi sosialisasi dari peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum

		Tindak Pidana Umum	B18: Adanya sosialisasi dari peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum	B18: Laporan sosialisasi dari peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum
		Badan Pendidikan dan Pelatihan	Penyusunan kurikulum mata pendidikan dan pelatihan untuk materi penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan	Penyusunan kurikulum mata diklat untuk materi penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan
		Badan Pendidikan dan Pelatihan	B24: Penyelenggaraan diklat akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas	B24: Laporan diklat akses keadilan bagi penyandang disabilitas
	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Tindak Pidana Umum	B06: Adanya diskusi awalan antara Kejaksaan dengan organisasi masyarakat sipil terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	B06: Laporan hasil diskusi awal bersama organisasi masyarakat sipil terkait monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan
			B12: Adanya diskusi terkait alat ukur monitoring dan evaluasi terhadap penanganan	B12: Laporan hasil diskusi terkait alat ukur monitoring dan evaluasi penanganan perempuan berhadapan dengan hukum

			perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	
			B18: Adanya diseminasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	B18: Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan
			B24: Adanya laporan tertulis hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	B24: Laporan hasil monitoring dan evaluasi
	Adanya evaluasi terhadap implementasi dari digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Tindak Pidana Umum	B06: Hasil diskusi awal bersama organisasi masyarakat sipil terkait evaluasi terhadap implementasi dari digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	B06: Laporan hasil diskusi awal bersama organisasi masyarakat sipil terkait evaluasi terhadap implementasi dari digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan
			B12: Laporan diskusi bersama organisasi masyarakat sipil terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	B12: Laporan diskusi bersama organisasi masyarakat sipil terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan

			B18: Laporan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh aparat penegak hukum dari hasil kajian organisasi masyarakat sipil	B18: Laporan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh APH dari hasil kajian organisasi masyarakat sipil
			B24: Laporan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh APH dari hasil kajian organisasi masyarakat sipil	B24: Laporan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh APH dari hasil kajian organisasi masyarakat sipil

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN